

SUAR *insight*

Ringkasan Eksekutif Spotlight:
MBG: Program Besar
untuk Hasil Besar



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Ringkasan Eksekutif: MBG Program Besar untuk Hasil Besar	3
Generasi Emas dari Makan Gratis	5
Program Terus Bergulir	19
Makmur Berkat Dapur	24



Sejumlah pelajar menikmati makanan bergizi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 13 Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Ringkasan Eksekutif: MBG: Program Besar untuk Hasil Besar

Indonesia menjadi negara ke-8 yang memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak, setelah Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, Timor Leste, dan Brunei Darussalam.

Penulis: **Mukhlison Widodo**

Program Makan Bergizi Gratis terus didorong agar cakupan meluas. Tujuannya bisa mengentaskan masyarakat dari kekurangan gizi hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tercatat hingga pekan kedua September 2025, sudah ada 7.477 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang resmi beroperasi di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.

Program ini melibatkan dukungan luas dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), hingga pelaku usaha di berbagai daerah.

- Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program sedang melakukan percepatan target aktivasi SPPG di berbagai daerah. Sehingga jumlah penerima layanan juga lebih luas.
- Bulan November nanti, percepatan ini juga diharapkan mampu mendongkrak jumlah SPPG hingga 25.000 unit, di wilayah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.
- Dalam hitungan BGN, operasional satu SPPG dalam sebulan diperkirakan penyerapannya bisa mencapai Rp 1 miliar.
- Pembangunan satu unit SPPG oleh pihak mitra/swasta membutuhkan biaya operasional Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar, sehingga merangsang perputaran dana di masyarakat.

Selengkapnya baca [di sini](#).

Pada tulisan kedua, simak wawancara SUAR dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana terkait perkembangan terbaru program Makan Bergizi Gratis, klik [di sini](#).

Pembentukan SPPG juga diharapkan menjadi perangsang gerakan ekonomi yang positif di lingkungannya.

- Mendorong aktivitas sektor usaha. Banyak restoran, kafe, dan hotel yang mengalihkan fungsi dapurnya menjadi dapur produksi SPPG.
- Setiap unit SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang, yang terdiri dari 1 kepala SPPG, 1 akuntan, 1 ahli gizi, dan 47 relawan.
- Jika nanti target 32.000 SPPG terpenuhi, maka akan ada setidaknya 1,5 juta lapangan pekerjaan.
- Bappenas menghitung, program MBG berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,86 persen, asalkan anggaran sebesar Rp 71 triliun terserap penuh dan tepat sasaran.

Selengkapnya baca [di sini](#).



Siswa bersiap menyantap makanan saat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana di SMP Negeri 2 Tabanan, Desa Delod Peken, Tabanan, Bali, Kamis (21/8/2025). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Generasi Emas dari Makan Gratis

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong pemerataan layanan Makan Bergizi gratis. Memperkuat pondasi sumber daya manusia Indonesia dan mendorong ekonomi.

Penulis: **Mukhlison, Harits Arrazie, dan Dian Amalia**

Mobil boks warna putih itu memasuki gang kecil di jalan Pendidikan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kamis, 4 September 2025 lalu. Setelah melalui berapa tikungan, mobil itu lalu berhenti di halaman SMP Negeri 138 Jakarta Timur. Sekejap kemudian, pintu belakang dibuka lalu ribuan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) diturunkan, siap dibagikan kepada seluruh siswa di sekolah itu.

Dan, para guru pun sigap memindahkan paket ke boks transparan, menatanya dengan rapi, dan bersiap membagikannya

pada pukul 13.00. “Hari ini menunya makanan kering karena baru jalan lagi setelah libur akibat demo,” ujar Yosi, sopir mobil yang membawa paket.

Program MBG di SMP Negeri 138 kembali beroperasi setelah libur tiga hari akibat kondisi Jakarta yang dilanda demonstrasi dan membuat Pemerintah Provinsi merekomendasikan kegiatan belajar mengajar online atau dalam jaringan (daring). Selama distribusi terhenti, aktivitas memasak di dapur juga ikut berhenti.



Truk pengangkut MBG di SMP N 138. Foto: SUAR/Dian Amalia.

Makanan itu dikirim dari dapur Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di Kompleks Era Mas 2000 Pulo Gebang, Jakarta Timur. Dapur milik Yayasan Salman Peduli Berkarya ini memasak sekaligus mendistribusikan MBG ke berbagai sekolah di Kecamatan Cakung, termasuk SMPN 138.

Saat SUAR berkunjung ke dapur tersebut pada Kamis, September 2025, tidak terlihat adanya aktivitas memasak. Pegawai dapur terlihat

hanya berbincang satu sama lain menghabiskan waktu. “Baru akan mulai memasak lagi Senin depan,” kata seorang pegawai dapur.

Program MBG di SMP Negeri 138 Jakarta Timur sudah berjalan sejak Januari 2025. Koordinator program di sekolah ini, Jayadi menegaskan program ini memberi manfaat besar bagi siswa, meski tidak lepas dari catatan perbaikan.

Jayadi mengingat, pada awal distribusi sempat ada kendala makanan datang terlambat. Beberapa kali paket baru tiba ketika siswa sudah pulang. “Itu

hanya sekali di awal, mungkin dapur masih adaptasi,” kata guru olahraga ini. Setelah itu, distribusi berjalan lancar.



Sejumlah anak menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di TK Negeri Pembina 8 kompleks Pemakaman Umum Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (20/8/2025). (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)

Kendala berikutnya terkait selera siswa. Menu yang disusun berdasarkan gizi kadang tidak sesuai dengan kebiasaan siswa yang lebih akrab dengan jajanan. “Yang disukai anak belum tentu gizinya bagus, sementara menu MBG gizinya bagus tapi anak kadang kurang suka,” ujarnya.

Meski begitu, makanan yang sesuai selera langsung habis. Mi goreng, kentang sebagai pengganti nasi, hingga ayam berbalut tepung menjadi menu favorit. “Kalau cocok, habis

semua,” kata Jayadi. Ia menekankan laporan tentang menu selalu diteruskan ke dapur agar diperbaiki.

Menurut Jayadi, dari 1.080 siswa penerima MBG yang tersebar di 30 kelas, hanya dua hingga tiga anak per kelas yang kadang tidak menghabiskan makanan. Jumlah itu dianggap kecil dibanding total penerima. Bagi Jayadi, masukan soal menu penting agar makanan lebih sesuai dengan selera tanpa mengorbankan nilai gizi.

“

Pernah juga ditemukan sayur yang tidak bersih sepenuhnya. Jayadi melaporkan ke pihak dapur, dan sejak itu masalah tidak muncul lagi.

”

Pernah juga ditemukan sayur yang tidak bersih sepenuhnya. Jayadi melaporkan ke pihak dapur, dan sejak itu masalah tidak muncul lagi. “Begitu dilaporkan, langsung diperbaiki,” ujarnya.

Untuk menjaga keberlangsungan kantin-kantin di sekolah, MBG tidak

langsung dibagikan pada jam istirahat pertama. Jayadi menjelaskan hal itu untuk memberi ruang bagi kantin tetap beroperasi. “Anak jajan dulu, baru setelah istirahat kedua MBG kami bagikan,” katanya. Dengan begitu, kantin tetap hidup dan siswa tetap mendapat makan siang.



Siswa membawa makanan bergizi gratis (MBG) di SDN Kunciran 2, Pinang, Kota Tangerang, Banten, Rabu (13/8/2025). ANTARA FOTO/Putra M. Akba.

Agar makanan segar ketika dibagikan, ia meminta pengiriman tiba pukul 11.00 WIB. Dengan jeda yang tidak terlalu lama, siswa bisa menikmati makanan dalam kondisi baik. “Ini juga agar kantin tetap laku, anak tetap makan, dan makanan terjaga kualitasnya,” ujar Jayadi.

Beban penanganan program cukup

besar karena jumlah siswa yang mencapai lebih dari seribu. Sekolah harus menurunkan 30 boks makanan setiap hari, membagikannya, lalu mengembalikan wadah setelah selesai. “Jumlah guru 40-an, piket datang 12 orang, piket pulang 12 orang, beda orang supaya tidak terlalu capek,” katanya.

Jayadi sendiri mengaku sering harus mengorbankan waktu mengajar untuk menyiapkan administrasi MBG. “Kadang jam dua siang belum selesai, padahal saya juga punya tugas lain,” katanya.

Ia menyadari kondisi ini berbeda dengan sekolah lain. Di beberapa sekolah, jumlah murid hanya sekitar lima ratus, bahkan ada yang kurang dari seratus. “Kita seribuan, jadi sekolah terbesar di Cakung. Wajar kalau bebannya lebih berat,” ucapnya.

Hingga kini, Jayadi mengaku belum menemukan solusi efektif untuk meringankan proses distribusi. Menurunkan boks, membagikan, hingga mengembalikan wadah tetap menyita tenaga. “Saya belum menemukan cara yang tepat, yang jelas cukup mengurus tenaga,” katanya.

Meski melelahkan, guru-guru tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jayadi menilai komitmen mereka tinggi. “Walaupun capek, guru-guru tetap menjalani dengan baik. Itu bukti komitmen,” ujarnya.

Dari sisi gizi, ia menilai komposisi harian relatif lengkap. Menu selalu menghadirkan sayur, karbohidrat berupa nasi, kentang, atau mi non-istan, serta buah dan susu. “Kalau dilihat dari empat sehat lima sempurna, sudah terpenuhi,” kata Jayadi.

Variasi menu tetap ada, meski ayam dan telur lebih sering muncul. Ikan jarang dihidangkan, padahal Indonesia negara maritim. “Menu ikan perlu ditambah. Negara kita banyak laut, mestinya ikan gampang,” katanya.

“

komunikasi dengan dapur selalu terbuka. Setiap masukan dari sekolah ditanggapi dengan cepat dan dijadikan bahan evaluasi

”

Ia menambahkan, komunikasi dengan dapur selalu terbuka. Setiap masukan dari sekolah ditanggapi dengan cepat dan dijadikan bahan evaluasi. “Kalau ada makanan kurang layak atau anak kurang suka, langsung kami laporkan. Selalu direspon dengan baik,” ujarnya.

Sejauh ini, belum pernah ada kasus keracunan atau alergi di SMP 138. Bagi Jayadi, ini membuktikan bahwa program MBG aman untuk siswa. Ia percaya tim gizi yang terlibat dalam

program ini mampu menjaga standar kesehatan makanan.

Jayadi menilai keberadaan MBG sangat penting bagi siswa, terutama yang berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah. Mayoritas murid SMP 138 adalah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau berasal dari sekitaran sekolah. “Program ini ibarat bantuan makan langsung bagi anak-anak yang membutuhkan,” katanya.

“

“Program ini ibarat bantuan makan langsung bagi anak-anak yang membutuhkan,” kata Jayadi.

”

Ia berharap program ini tetap berlanjut dengan catatan kecil pada variasi menu. “Yang penting makanan jangan mubazir, habis disantap anak, dan tetap bergizi,” kata Jayadi.

Investasi sumber daya manusia unggul

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, setelah melalui berbagai uji coba. Program di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional

(BGN) tersebut merupakan salah satu andalan – sekaligus termasuk dalam 8 program pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.



Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Foto: BPMI Setpres/Cahyo.

Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara ke-8 yang memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak, setelah Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, Timor Leste, dan Brunei Darussalam.

Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk mendanai program MBG dengan target 19,47 juta penerima manfaat. Program MBG

menyasar peserta didik mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA/ sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sedangkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 yang dibacakan Presiden Prabowo pertengahan Agustus lalu, anggaran MBG melonjak menjadi Rp335 triliun. Program ini memang menjadi program impian sejak Prabowo berkampanye.

Ia meyakini MBG menjawab tantangan malnutrisi di Indonesia, yaitu kekurangan gizi dan kekurangan zat gizi mikro. Data tahun 2022 mencatat bahwa 32% anak Indonesia mengalami

anemia, 41% tidak sarapan, dan 58% memiliki pola makan tidak sehat, terutama pada kelompok rentan di fase emas pertumbuhan.

Prevalensi Status Stunting Balita Tahun 2024

(persen)

0 100



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia 2024, Kementerian Kesehatan. •

Diolah Tim SUAR/ Ratri.

- Secara nasional, prevalensi mencapai 19% balita yang berstatus stunting di tahun 2024.

SUAR SALITUPAN RASIONAL
GIZI DAN GIZI

Dengan dapur yang bernama Sentra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu melayani rata-rata 3.000 orang per hari, menu MBG disusun berdasarkan prinsip “Isi Piringku” dan memenuhi 25%–35% kebutuhan gizi harian. Program ini diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan sistem digital nasional untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Di samping manfaat gizi dan kesehatan, MBG turut memperkuat ketahanan ekonomi melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, penciptaan jutaan

lapangan kerja, dan stabilisasi harga pangan lewat pembelian langsung dari produsen rakyat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, program MBG terus bergulir dan berekspansi dengan pendirian SPPG baru per hari di setiap provinsi di Indonesia. Dalam catatan BGN, hingga Senin, 8 September 2025 lalu, sudah ada sekitar 7.477 SPPG yang resmi beroperasi di 38 provinsi, 509 kabupaten, 7.022 kecamatan.



Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Foto: BPMI Setpres/Rusman.

“Jadi ada 5 kabupaten belum satu pun SPPG yang operasional,” kata Dadan. Kabupaten yang belum ada SPPG nya adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat; Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT); Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat Daya; dan Kabupaten Mahakam Hulu, di Provinsi Kalimantan Timur.

Program ini melibatkan dukungan luas dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain ribuan SPPG aktif, terdapat ribuan lainnya yang sedang dalam tahap persiapan untuk beroperasi.

Pihak BGN, kata Dadan, saat ini juga sedang melakukan percepatan target aktivasi SPPG di berbagai daerah. Sehingga jumlah penerima layanan juga lebih luas. Seperti pada Juli 2025 lalu target awal yang ditetapkan pengaktifan SPPG hingga 1.994 unit dengan 6 juta penerima manfaat, realisasinya bisa mencapai 2.391 SPPG dengan 7 juta penerima manfaat.

Percepatan ini juga selaras dengan langkah BGN untuk merekrut SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, yang merupakan program pelatihan dan pendidikan untuk menghasilkan lulusan sarjana yang akan menjadi pemimpin dan penggerak teknis, terutama dalam mendukung program nasional MBG ini.

“

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, yang merupakan program pelatihan dan pendidikan untuk menghasilkan lulusan sarjana yang akan menjadi pemimpin dan penggerak teknis

”

Bulan November nanti, percepatan ini juga diharapkan mampu mendongkrak jumlah SPPG hingga 25.000 unit, di wilayah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.

Dadan menegaskan, pihaknya memang terus menggenjot pendirian SPPG karena ini identik dengan

penyerapan anggaran yang selama ini nilai kurang optimal. Dalam hitungan BGN, operasional satu SPPG dalam sebulan diperkirakan penyerapannya bisa mencapai Rp 1 miliar. “Artinya kalau ada 7.000 SPPB ada Rp 7 triliun yang terserap dalam sebulan,” katanya.

Perlu mendengar aspirasi dan selera siswa

Meski tidak terlalu besar kendala yang dihadapi, menu MBG yang kurang sesuai kadang membuat program ini jadi kurang sempurna. Beberapa pengakuan dari wali dan siswa perlu menjadi catatan buat BGN untuk berbenah.

Seperti yang diutarakan Lia, bukan nama sebenarnya, yang merupakan kakak dari seorang siswa SMP 138 Jakarta Timur. Adiknya duduk di kelas 7 dan sudah menerima MBG sejak hari pertama masuk sekolah. Menurut Lia, sang adik kerap mengeluhkan soal rasa dan kualitas makanan MBG.



Siswa PAUD dan TK berdoa sebelum makan bersama di TK Negeri Pembina 8 kompleks Pemakaman Umum Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (20/8/2025). ANTARA FOTO/Olha Mulalinda.

Lia menuturkan, adiknya sering membawa pulang MBG karena tidak habis dimakan. “Awal-awal dia bilang telurnya sudah bau, rasanya tidak enak,” katanya.

Di rumah, Lia coba membuktikan keluhan sang adik. Ia mencicipi sayur dalam paket MBG. “Rasanya asam. Seperti belum matang sempurna,” katanya.

Sedangkan Wati, orang tua Rohim, keduanya juga bukan nama sebenarnya, yang bersekolah di SDN 07 Pulo Gebang, bersebelahan dengan SMP 138, menambahkan keluhan serupa. Ia menyebut sayur kerap pahit atau asam.

Untuk menu ayam teriyaki, Wati pernah melihat langsung adanya lendir di ayam. “Kalau ada yang begitu-

begitu, saya bilang ke anak saya supaya jangan dimakan,” ujar Wati.

Rohim mengaku paling tidak suka pada sayur dan telur yang disajikan MBG. Serupa dengan pengakuan sang ibu, ia menilai rasanya pahit. Rohim mengaku pernah melepeh tahu dan telur yang disajikan dalam MBG. “Enggak bisa ditelan. Begitu masuk mulut langsung terasa enggak enak,” ujarnya.

Ketika makanan MBG tidak dihabiskan, Rohim membawa pulang makanan itu dengan wadah yang sudah dibawakan Wati dari rumah. Wati pun mengatakan pada Rohim untuk hati-hati sebelum mengudap makanan MBG. “Dia paling ambil buah atau susu saja,” ujar Wati.



Siswa melihat isi makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri Bulagor 1, Pandeglang, Banten, Selasa (9/9/2025). (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Soal penyaluran aspirasi, Wati dan Lia mengaku belum berani menyampaikan keluhan ini langsung ke sekolah. Mereka khawatir dianggap rewel karena program ini sifatnya gratis. “Guru-guru sebenarnya terbuka, tapi soal dapur kami tidak tahu,” ujar Wati. Mereka hanya bisa menyampaikan keluhan kepada pihak sekolah dengan harapan keluhan itu diteruskan kepada pihak dapur.

Karena MBG tidak selalu dimakan, Wati mengatakan uang jajan anaknya tidak berkurang. Jika menu cocok, anak bisa menunda makan di rumah. Jika tidak, anak tetap jajan atau makan bekal. Dengan pola ini, keluarga menilai dampak penghematan dari program MBG belum terasa sama sekali.

Wati mengatakan kalau Rohim tidak pernah mengalami sakit perut setelah mengonsumsi MBG. “Alhamdulillah tidak,” katanya. Mereka memilih berhati-hati, hanya memakan yang dinilai layak dan membuang sisanya bila ragu.

Melihat makanan MBG yang kualitasnya meragukan, Lia menilai usulan perbaikan bisa diarahkan pada model penyaluran bantuan. Ia mencontohkan skema di daerah lain yang memberikan bantuan tunai harian langsung kepada orang tua. “Kalau setiap hari diberi Rp 15.000 dan dimasak di rumah, pasti dimasak,” ujar Lia.

Melihat makanan MBG yang kualitasnya meragukan, Lia menilai usulan perbaikan bisa diarahkan pada model penyaluran bantuan. Ia mencontohkan skema di daerah lain yang memberikan bantuan tunai harian langsung kepada orang tua.

Selain itu, Wati juga menganggap memberikan uang tunai langsung kepada siswa akan lebih tepat sasaran. Dengan begitu, siswa bisa langsung menggunakan uang tersebut untuk jajan di kantin sekolah. “Kalau seperti sekarang kan sayang. Makanannya banyak nggak dihabiskan,” katanya.

Wati dan Lia menilai menu MBG lebih aman ketika bentuknya makanan kering dalam kemasan atau berupa susu dan buah. Pada hari-hari seperti itu, anak cenderung mengambil dan menghabiskannya. Mereka berharap menu harian mempertimbangkan keamanan dan rasa agar tidak mubazir.

Keluarga juga mengakui sekolah menjaga ketertiban distribusi dan meminta siswa tidak meninggalkan sisa makanan di lingkungan sekolah.

Karena itu, makanan yang tidak habis dibawa pulang. Di rumah, keputusan dimakan atau dibuang ditentukan setelah dicoba.

Lia dan Wati menegaskan kembali, mereka tidak menolak kepedulian pemerintah melalui program MBG. Namun mereka meminta kualitas, rasa, dan variasi menu diperbaiki agar benar-benar dimakan dan bermanfaat kepada siswa. “Yang penting layak, supaya habis dimakan,” kata Lia.

Dadan Hindayana menegaskan, pihaknya akan selalu mengevaluasi agar menu makan siang dari program ini terjaga mutunya. BGN juga memastikan seleksi dilakukan ketat untuk pengelola makanan, untuk menjaga kualitas layanan, termasuk pemenuhan syarat teknis dan manajemen distribusi pangan.

“

Dadan Hindayana menegaskan pihaknya akan selalu mengevaluasi agar menu makan siang dari program ini terjaga mutunya.

”

Dadan menambahkan, peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui pengetatan standar operasional prosedur (SOP). Langkah ini mencakup pemilihan bahan baku yang lebih baik, pemangkasan waktu memasak

dan pengiriman, serta memastikan makanan tidak disimpan di sekolah lebih dari empat jam untuk menjaga kesegaran dan keamanan pangan. “Kami juga ada evaluasi oleh pakar gizi,” ujarnya.

Kepala daerah siap mensukseskan

Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu, menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Ia menyebut program itu wajib didukung karena sejalan dengan kebijakan besar presiden.

Di wilayahnya, pelaksanaan MBG masih dalam tahap awal. Masinton menjelaskan, daerahnya menargetkan pembangunan 42 dapur, namun hingga kini baru 18 yang mengajukan izin dan tiga di antaranya sudah beroperasi. “Selebihnya masih dalam proses pembangunan,” katanya kepada SUAR.



Siswa melihat isi makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri Bulagor 1, Pandeglang, Banten, Selasa (9/9/2025). (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Meski baru berjalan di tiga titik, tantangan sudah muncul. Menurut Masinton, persoalan utama terletak pada proses memasak dan distribusi makanan karena jarak antar wilayah cukup jauh. Ia memastikan pemerintah daerah terus memantau agar tahap pembangunan dapur lain bisa segera rampung.

Sedangkan Johannes Rettob, Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah, menyatakan bahwa daerahnya sudah menyiapkan program MBG, meski dengan pendekatan berbeda dibanding dengan wilayah Jawa. Dari 24 dapur yang direncanakan, 13 sudah disiapkan. Namun ia menekankan, kondisi Papua memiliki tantangan tersendiri.

Menurut Johannes, faktor budaya membuat pola pelaksanaan MBG di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Ia mencontohkan, program makanan tambahan bergizi dari dana otonomi khusus sebenarnya

sudah berjalan sejak 2018 di hampir seluruh sekolah di Papua. “Hampir semua sekolah kita kasih makan,” ujarnya.

Meski begitu, penerimaan masyarakat terhadap MBG tidak merata di seluruh wilayah di Papua. Di Mimika, misalnya, ada yang menerima, ada pula yang menolak. Johannes melihat jika model pelaksanaannya hanya diserahkan ke yayasan, program punya risiko berhenti di tengah jalan. “Baru satu minggu saja sudah mulai banyak penolakan kalau modelnya seperti itu,” katanya.

Ia mengusulkan model berbeda, yakni pemerintah menyiapkan dapur saja, sementara orang tua dilibatkan langsung untuk memasak. Menurutnya, cara ini lebih menjamin kualitas makanan dan menjaga biaya tetap terkendali. “Orang tua akan masak yang terbaik untuk anak-anak, tanpa motivasi mencari uang,” ujar Johannes.

“

Ia mengusulkan model berbeda, yakni pemerintah menyiapkan dapur saja, sementara orang tua dilibatkan langsung untuk memasak. Menurutnya, cara ini lebih menjamin kualitas makanan dan menjaga biaya tetap terkendali.

”

Johannes mengapresiasi niat pemerintah pusat memberikan asupan gizi kepada lewat program MBG. Namun ia menekankan pelaksanaan di lapangan harus disesuaikan agar tepat sasaran.

Kontrol anggaran penyelenggaraan

Seiring pemerintah mendorong alokasi anggaran yang terus membesar untuk menggelar MBG, kekhawatiran pun bermunculan. Karena MBG dinilai bisa membebani postur anggaran pemerintah. Realokasi berasal dari pos-pos eksisting, termasuk pendidikan, ke MBG bisa berdampak ke sektor lain..

Seperti investasi jangka panjang untuk riset, guru, infrastruktur

sekolah, hingga transfer ke daerah berpotensi tertekan. Karena itu Center of Economic and Law Studies (Celios) mengimbau agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terkait relokasi ini. “Cerita anggaran harus dilihat utuh, dari riset sampai akses jalan ke sekolah,” kata Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar.



Dalam RAPBN 2026, pembangunan generasi unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggarkan senilai Rp335 triliun, ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. (Dok. Kantor Staf Presiden)

Ia membandingkan nilai yang diterima penerima manfaat buat makan gratis dengan penerimaan langsung, bedanya besar. Dengan anggaran Rp335 triliun pada 2026, setiap penerima mendapat rata-rata Rp20.000 per hari. Kalau dipersempit hanya untuk keluarga miskin, per hari bisa dapat sekitar Rp50.000. Nilai ini

tentu lebih besar dengan jatah MBG yang diplot Rp10.000 sehari.

Skema bantuan tunai terarah, menurut Media, justru berpotensi lebih efektif dibanding dengan paket makanan kecil dengan kualitas yang kerap dipertanyakan.

Skema bantuan tunai terarah, menurut Media, justru berpotensi lebih efektif dibanding dengan paket makanan kecil dengan kualitas yang kerap dipertanyakan.

Ia juga menyinggung sumber gejolak politik beberapa waktu lalu: kebijakan pemangkasan anggaran atau yang lebih akrab di telinga sebagai 'efisiensi'. Pemerintah memangkas dana daerah, riset, hingga ATK, lalu menggesernya ke belanja pusat, termasuk MBG. "Argumen 'daerah boros' itu lebih gimmick daripada kenyataan," kritiknya.

Bagi Media, masalah fiskal bukan sekadar soal belanja, tapi juga penerimaan negara. Pajak, ujarnya, masih dikejar dengan logika berburu ketimbang kontrak sosial yang adil. "Akibatnya masyarakat resisten, sementara kebijakan strategis seperti MBG tetap jalan," katanya.



Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengamati karya foto dalam pameran Perjalanan Gizi untuk Indonesia di Antara Heritage Center, Jakarta, Selasa (19/8/2025). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Program Terus Bergulir

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis terus digeber. BGN meluruskan berbagai kesalahpahaman publik selama ini.

Penulis: **Mukhlison, Harits Arrazie, dan Dian Amalia**

Wawancara dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana

Harmonisasi anggaran dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), menjadi salah satu pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi IX DPR RI pada senin 8 September 2025 lalu.

Pembahasan masalah ini mencuat, karena lingkup kerja BGN masuk ke wilayah kerja dua lembaga itu. Badan POM sebagai pihak yang mengawasi

kualitas makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga Kemendukbangga/BKKBN yang mengurus Posyandu perlu diperjelas sumber anggarannya bila memasuki wilayah kerja yang merupakan tanggung jawab BGN.

Persoalan anggaran adalah salah satu yang harus diurai penyelesaiannya oleh Dadan Hindayana, Kepala BGN. Ada setumpuk masalah lain yang perlu diselesaikan BGN agar masyarakat percaya kepada BGN dan Program MBG.



Badan Gizi Nasional BNG menyampaikan perkembangan penyerapan anggaran Program MBG serta rencana kebutuhan anggaran tahun depan dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/9). (SUAR/Mukhlison)

Namun di antara banyak pembahasan di RDP hari itu, Dadan juga diminta untuk hati-hati mengelola keuangan yang dialokasikan untuk program MBG, dimana APBN 2025 mengalokasikan anggaran hingga Rp71 triliun sedangkan RAPN 2026 berlipat hingga Rp335 triliun.

Lalu apakah ada progres signifikan dari pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini, di sela RDP dengan Komisi IX DPR Senin 8 September 2025, Dadan beberapa kali memberikan penjelasan kepada wartawan SUAR. Petikannya:

Seperti apa perkembangan terakhir dari program MBG saat ini?

Program MBG terus bergulir dan berekspansi dengan pendirian SPPG baru per hari di setiap provinsi di Indonesia. Dalam catatan BGN, sudah ada sekitar 7.477 SPPG yang resmi beroperasi di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.

Kami juga telah menetapkan pagu anggaran tahun anggaran 2026 sebesar Rp 268 triliun dengan fokus

utama pada program pemenuhan gizi melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan kelompok rentan

Ada alokasi tambahan Rp 50 triliun yang akan dibagi untuk sejumlah kebutuhan. Sekitar Rp 34,4 triliun dialokasikan untuk bantuan pangan MBG anak sekolah. Lalu Rp 3,1 triliun untuk ibu hamil, menyusui, dan balita.

Banyak anggapan anggaran BGN dan MBG diambil dari anggaran pendidikan, penjelasan Anda?

Anggaran BGN pada 2026 berdasarkan fungsi kesehatan sebesar Rp 24,7 triliun, Rp 223 triliun dari fungsi pendidikan dan Rp 19,7 triliun dari fungsi ekonomi. Jadi di dalam nota keuangan yang kemudian ramai

dibahas itu semuanya masuk dalam anggaran pendidikan, padahal sebetulnya dari pendidikan 83,4%, kesehatan 9,2%, ekonomi 7,4%. Jadi berasal dari tiga sumber fungsi.

Selain anggaran, program ini juga mulai dikritisi terkait ketersediaan dapur umum atau SPPG yang kuotanya mulai menipis, sedangkan layanan belum optimal, apa mitigasi BGN agar hambatan di program ini bisa ditertibkan?

Kami kemarin melakukan penutupan web atau portal untuk pendaftaran mitra baru. Dalam tahap verifikasi pendaftaran pembentukan SPPG, saat itu sudah ada 4.500 pengajuan. Kemudian kita tutup web sementara agar tidak ada pengajuan verifikasi lagi. Dan terdeteksi ada banyak yang

tidak aktif. Kemudian SPPG yang tidak aktif selama 20 hari ke atas kita kembalikan ke verifikasi pengajuan. Sehingga kuota menjadi terbuka kembali, mudah-mudahan tanggal 15 September nanti, pendaftaran bisa dibuka kembali.

Saat ini BGN melakukan percepatan pembukaan SPPG, sementara itu bisa memicu penyelewengan, ada alasan khusus?

Pembangunan SPPG yang sudah ada dan yang sudah operasional itu 100%-nya berasal dari dana masyarakat. Sementara penyerapan di BGN identik dengan jumlah penerima manfaat sehingga kita perlu melakukan

percepatan, agar penerima manfaat juga meluas. Selain itu setiap 1 SPPG berdiri maka akan menyerap sekitar Rp 1 miliar (makanan) per bulan, ini dampaknya akan signifikan.

Kenapa percepatan diutamakan di wilayah aglomerasi?

Kami fokus ke aglomerasi, karena 90% atau hampir sekitar 70 juta penduduk berkumpul di daerah aglomerasi, di situ juga berkumpul warga kurang gizi seperti di Jawa Barat, di Jawa

Tengah dan Jawa Timur. Sementara di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) memang konsentrasi warga kurang gizi tinggi namun jumlah penduduknya sedikit.

Apa yang Anda lakukan agar percepatan itu bisa mencapai target?

Strategi kami, percepatan di aglomerasi kita kejar dengan bekerjasama dengan pihak mitra, agar mau berinvestasi. Sedangkan di daerah 3T kita bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk membentuk masing-masing satgas di wilayahnya, yang menentukan titik pembangunan SPPG.

Dan untuk membangun SPPG di 3T kita bisa juga menggandeng mitra namun ada insentif. Seperti kita berikan anggaran sewa tempat yang dibayar selama 4 bulan di depan. Untuk pengelolaan kita juga gandeng tokoh masyarakat setempat juga dengan yayasan.



Petugas memeriksa ban mobil yang terselat menghindari jalan rusak saat penyaluran makan bergizi gratis (MBG) di Desa Bulagor, Pagelaran, Pandeglang, Banten, Selasa (9/9/2025). (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

BGN juga melakukan pengelolaan makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita, seperti apa perkembangannya?

Kami saat ini bekerjasama dengan Kementerian Kependudukan/BKKN sehingga kami melakukan kerjasama dengan seluruh kader Posyandu yang ada di daerah. Mekanismenya, SPPG mengirimkan makanan ke Posyandu,

lalu para kader tadi mengirimkan makanan ke rumah-rumah penerima manfaat. Kader-kader ini juga kita berikan insentif yang diambil dari anggaran operasional BGN.

Masyarakat menyoroti soal program MBG yang menggunakan foodtray impor, ada komentar?



Tumpukan foodtray di SPPG Polri Pejaten (SUAR/Dian Amalia)

Dulu kita merancang ini, saat di pasaran di Indonesia belum ada yang memproduksi sesuai dengan standar yang kita inginkan. Meskipun ada, kemampuan dalam negeri hanya sekitar 10 juta sampai 11 juta per bulan, sementara kebutuhan kita 80 juta per bulan. Makanya Kementerian Perdagangan sengaja

membuka impor, sehingga kami bisa menjalankan program dengan baik.

Foodtray ini juga yang membeli mitra. Jadi BGN selama ini belum menggunakan APBN untuk pembelian foodtray. Kami akan menggunakan anggaran dari APBN buat foodtray ini untuk melayani di wilayah 3T.



Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mandai 1, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025). ANTARA FOTO/Hasrul Said.

Makmur Berkat Dapur

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi pusat persemaian ekonomi yang menghimpun berbagai sumber daya ekonomi lokal. Jumlahnya terus bertambah.

Penulis: **Mukhlison, Harits Arrazie, dan Dian Amalia**

Sudah enam bulan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Pejaten, Jakarta Selatan, ini menjadi salah satu dapur umum yang memasok makanan program Makan

Bergizi Gratis (MBG). Sejak didirikan pada Maret lalu, hingga saat ini, SPPG Polri di Pejaten ini memasok setiap harinya sekitar 3.417 porsi makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dan warga sekitar Pejaten.



SPPG Polridi Pejaten (SUAR/Dian Amalia)

SPPG Polri di Pejaten, salah satu dari 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) prioritas, yang terdiri atas 2 SPPG di Mabes Polri dan 16 lainnya di jajaran polda. Salah satu yang dilayani SPPG Polri di Pejaten ini adalah SMK Kemala Bhayangkari Delog di Jakarta Selatan.

Ada 695 siswa yang menerima MBG setiap hari di sekolah ini. Staf kesiswaan yang juga penanggung jawab distribusi MBG di SMK kemala Bhayangkari, Asih Wisata Sari, 54 tahun, mengaku selama enam bulan ini program MBG yang dipasok dari SPPG Polri di Pejaten berjalan lancar tanpa kendala berarti.



SPPG Polri Pejaten Jadi Percontohan Program Makanan Bergizi Gratis.

“Sejauh ini kualitas makanan yang kami terima masih bagus, cukup layak,” ujar Asih kepada SUAR, Selasa 9 September 2025. Ia juga melihat langsung dapur SPPG Polri yang dilengkapi peralatan modern. “Dapurnya canggih, jadi human error bisa diminimalkan. Kontrol kualitas

(QC)-nya ketat,” tambahnya.

SPPG Polri di Pejaten bahkan sempat dinilai BGN sebagai salah satu yang terbaik, dengan standar higienitas dan sanitasi yang tinggi, hingga dijadikan model rujukan nasional.



Penanggung jawab distribusi MBG di SMK kemala Bhayangkari, Asih Wisata Sari (SUAR/Dian Amalia)

Asih mengakui ada satu-dua tantangan dalam operasional SPPG, misalnya keterlambatan distribusi akibat banjir di beberapa titik distribusi karena hujan deras atau kecelakaan kerja di dapur. Ia juga bercerita, saat terjadi unjuk rasa besar di Jakarta, program ini sempat terhenti. “Tapi itu pun selalu diberitahukan. Kalau tidak ada kendala, makanan biasanya sampai sebelum jam 11 siang,” katanya.

Selama operasional, SPPG lazimnya melibatkan banyak tenaga kerja untuk bisa menyediakan hidangan buat penerima manfaat program. Satu unit SPPG diperkirakan dapat mempekerjakan sekitar 50 orang, yang meliputi tenaga profesional seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan, serta 47 tenaga operasional seperti juru masak, tenaga pemorsi, logistik, dan kebersihan.

“

Jumlah SPPG sendiri juga terus bertambah, seiring meluasnya implementasi program ini ke banyak daerah.

”

Jumlah SPPG sendiri juga terus bertambah, seiring meluasnya implementasi program ini ke banyak daerah. Saat dimulai pelaksanaan MBG pada Januari 2025 silam, tercatat sudah ada 220 SPPG yang melaksanakan program ini, dan terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita.

Lalu setelah enam bulan pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 22 Juni 2025, sudah berdiri 1.837 unit SPPG dan telah beroperasi hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Kebutuhan SDM terus bertambah

Program ini juga secara langsung dan tak langsung bisa menjadi lokomotif baru pendongkrak ekonomi. Menurut Dadan Hindayana, Kepala BGN, satu unit SPPG membutuhkan biaya operasional Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar, sehingga total perputaran dana

di masyarakat diperkirakan sudah mencapai lebih dari Rp28 triliun. “Ini 100 persen dana masyarakat bukan berasal dari APBN,” kata Dadan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin, 8 September 2025.

“

Kapasitas layanan meningkat signifikan, dari rata-rata 500 porsi per hari menjadi sekitar 3.500 porsi yang langsung didistribusikan ke sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tanpa makan di tempat.

”

Implementasi MBG disebut juga mendorong aktivitas sektor usaha. Banyak restoran, kafe, dan hotel yang mengalihkan fungsi dapurnya menjadi dapur produksi SPPG. Kapasitas layanan meningkat signifikan, dari rata-rata 500 porsi per hari menjadi sekitar 3.500 porsi yang langsung didistribusikan ke sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tanpa makan di tempat.

Menurut Staf Khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan, jumlah SPPG akan terus bertambah dalam beberapa bulan ke depan. “Secara eksponensial sampai bulan November target total 32.000

unit SPPG di seluruh Indonesia,” kata Redy, seperti dikutip dari situs Badan Gizi Nasional.

Pada bulan Juni juga, BGN mencatat sebanyak 72.521 orang telah bekerja dalam pelaksanaan operasional MBG di SPPG. “Jika nanti target 32.000 SPPG terpenuhi, maka akan ada setidaknya 1,5 juta lapangan pekerjaan dari program ini,” tambah Redy.



Pelajar menyantap makanan bergizi gratis di SMK Negeri 2 Denpasar, Bali, Rabu (13/8/2025). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf.

Di sisi lain, kebutuhan bahan baku untuk MBG juga sangat besar, terutama untuk sayuran. Deputi Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Tigor Pangaribuan, mencontohkan, satu dapur pelayanan bisa menghabiskan hingga 300 kilogram sayuran setiap hari. Jika ada 100 SPPG, maka kebutuhan sayuran bisa mencapai sekitar 30 ton per hari.

Selain sayuran, dapur SPPG membutuhkan sekitar 200 kilogram beras, 150 kilogram hingga 300 kilogram bahan pangan hewani seperti daging sapi, ikan, ayam, atau telur,

serta 150 kilogram sampai 160 kilogram bahan pangan nabati seperti tahu dan tempe.

Sayuran yang dibutuhkan mencapai 120 kilogram hingga 150 kilogram, sedangkan buah mencapai 350 kilogram. Untuk melengkapi kebutuhan gizi anak-anak, susu dibutuhkan sebanyak 345 liter setiap hari, ditambah bawang antara 5 kilogram sampai 8 kilogram, dan minyak goreng sebanyak 54 liter hingga 72 liter.

“

Dalam satu bulan, satu SPPG harus menyiapkan 4 ton beras, 3 ton hingga 6 ton protein hewani, 3 ton sampai 3,2 ton protein nabati, 2,4 ton hingga 3 ton sayur, dan 7 ton buah.

”

Ketika dikonversi ke kebutuhan bulanan, angka-angka itu bisa berlipat signifikan. Di mana dalam satu bulan, satu SPPG harus menyiapkan 4 ton beras, 3 ton hingga 6 ton protein hewani, 3 ton sampai 3,2 ton protein nabati, 2,4 ton hingga 3 ton sayur, dan 7 ton buah.

Tak kalah penting, susu harus tersedia sebanyak 6.900 liter per bulan, disusul bawang 100 sampai 160 kilogram, dan minyak goreng sekitar 1.080 liter hingga 1.440 liter.

Untuk kebutuhan sumber daya manusia, pembentukan SPPG juga diharapkan bisa menjawab penawaran tenaga kerja yang selama ini belum banyak terserap sektor ketenagakerjaan.

Dengan target 30.000 SPPG, di mana

satu SPPG akan membutuhkan kepala unit, ahli gizi, dan akuntan, maka setidaknya akan membuka 90.000 lapangan pekerjaan. “Jadi kepala unit, itu ada 30.000 nanti otomatis kita rekrut 30.000 sarjana di Indonesia untuk jadi kepala,” kata Tigor.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn) Ludwig Pusung, menegaskan, angka-angka tersebut bukanlah hasil perkiraan atau simulasi di atas kertas. “Ini bukan angka simulasi, ini hasil uji coba dan simulasi nyata di lapangan,” tegasnya.

Di beberapa tempat, pelaksanaan program ini juga mulai kelihatan gairahnya. Di kota Palangkaraya, Kalimantan Timur, pemerintah setempat menghitung sudah ada 650 tenaga kerja telah terserap dalam pelaksanaan program ini.



Plh Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Arbert Tombak memimpin rapat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangkaraya, Senin (8/9/2025), (Dok. Pemko Palangkaraya)

Palangka Raya, Aprae Vico Ranan, menegaskan, selama ini pihaknya mendorong pelaksanaan program MBG terus melibatkan berbagai elemen ekonomi lokal, seperti petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM, sebagai pemasok bahan pangan untuk dapur SPPG.

“Program ini tentunya memberikan kesempatan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, dan saat ini sudah ada 13 SPPG yang beroperasi,” ujar Vico, Jumat 5 September 2025.

Menurutnya, setiap unit SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang, yang terdiri dari 1 kepala SPPG, 1 akuntan, 1 ahli gizi, dan 47 relawan. Rencana pengembangan program ke depan mencakup penambahan 19 unit SPPG baru, yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.

“Dengan penambahan ini, diharapkan akan tercipta lebih banyak lapangan kerja dan memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program MBG,” ungkapnya.

Program efektif dampak ekonomi optimal

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa program MBG berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,86 persen, asalkan anggaran sebesar Rp71 triliun terserap penuh dan tepat sasaran. “Tapi kalau belanjanya tidak penuh atau tidak tepat sasaran, ya tidak bisa,” ujar Rachmat.

Menurutnya, kontribusi ekonomi program MBG akan sangat bergantung pada realisasi dan kualitas belanjanya. Ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi MBG agar dampaknya tidak hanya terlihat dari sisi anggaran, tetapi juga dari capaian ekonomi dan sosial secara langsung.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat, diproyeksikan berkisar 185.000 orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

Simulasi yang dilakukan Institute for Development of Economics & Finance (Indef) dengan menyebutkan, pelaksanaan Pilot Project MBG pada Mei 2024 juga menunjukkan dampak positif secara ekonomi. Riset Indef memotret uji coba MBG yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan platform digital, GoTo Group, sebagai studi kasus.

Layanan transportasi online memilih mitra-mitra UMKM terdekat dari sekolah untuk memasok menu program MBG. Hasil estimasi efek pengganda program MBG berdasarkan pelaksanaan pilot project, menunjukkan dampak ekonomi yang besar.

Seperti alokasi belanja program MBG akan mendorong pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor dan investasi dalam negeri. Dengan demikian, program MBG agar terdesentralisasi menggunakan sumber pangan dan bahan baku lokal sehingga biaya distribusi lebih murah, mengurangi nilai impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta UMKM.

Indef menemukan, terdapat peningkatan rerata 3 tenaga kerja pada UMKM yang terlibat pilot project program MBG di 10 kota/kabupaten. UMKM yang terlibat dalam pilot project

program MBG mendapatkan rata-rata pendapatan bersih per bulan 33,68% lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan sebelum mengikuti program MBG.



Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik (kedua kiri) didampingi Deputi bidang penyaluran badan gizi nasional Brigadir Jenderal TNI (Purn) Suadi Samiran (ketiga kiri) dan Bupati Maros Chaidir Syam (kiri) melakukan panen ikan bandeng di instalasi tambak Silvafishery Marana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025). (ANTARA FOTO/Hasrul Said)

Sedangkan mitra pengemudi di 10 kota/kabupaten yang melaksanakan pilot project program MBG mendapatkan pendapatan bersih 17% lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelum melaksanakan program MBG.

Selain itu, terdapat peningkatan rerata 2 tambahan pemesanan yang diterima oleh mitra pengemudi di 10 kota/kabupaten yang melaksanakan pilot project program MBG.

Sedangkan pihak Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan catatan, jika desain MBG terlalu

berpusat pada negara. Lembaga ini menyoroti program MBG dengan pola kerja yang sentralistik dari atas ke bawah. "Intervensi berlebihan justru mengganggu mekanisme pasar," kata Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar.

Dampak MBG, lanjutnya, tidak hanya dirasakan di tingkat kebijakan. Di rumah tangga dan lingkungan sekolah, program ini memunculkan efek substitusi. Sebelum program hadir, konsumsi anak banyak disuplai warung atau kantin. Setelah MBG berjalan, alhasil, transaksi di kantin menurun.

Situasi kian kompleks ketika dapur besar penyedia MBG tidak berbelanja ke UMKM sekitar, melainkan mengambil bahan pokok dari perusahaan besar di luar kawasan sekolah. “Program ini seharusnya punya multiplier effect. Tapi karena belanja bukan dari UMKM dan serapan tenaga kerja juga tidak transparan, ekonomi di bawah justru tidak bergairah,” kata Media.

Ia khawatir rantai pasok MBG akan terkonsentrasi pada segelintir

pemasok besar, termasuk dalam pembelian beras dan bahan pokok. “Uang berputar di luar kampung,” ucapnya.

Padahal, kata dia, UMKM lokal justru minim mendapat ruang. Bahkan, keterlibatan pengusaha pun nyaris absen. “Entitas pelaku usaha seharusnya masuk dalam proses desain MBG secara partisipatif. Itu relatif tidak terjadi hari ini. Bahkan Apindo tidak dilibatkan,” ujarnya.



Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Ulu 2 di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (27/8/2025). ANTARA FOTO/M Risyah Hidayat.

Media mendorong agar pemerintah mengunci keterlibatan UMKM melalui regulasi yang jelas. Ia mencontohkan, proyek strategis lain bisa menetapkan kewajiban serapan UMKM lokal dengan porsi tertentu. “Kenapa MBG tidak bisa? Itu bisa dikunci lewat regulasi,” ujarnya.

Sorotannya juga tertuju pada tenaga kerja. Klaim pemerintah soal penciptaan lapangan kerja di dapur penyedia, menurutnya belum

terbukti kuat. Basis data pekerja tidak transparan, proses pendaftaran dapur pun rawan menyalahi prinsip persaingan sehat.

Menurutnya, proses pendaftaran dan seleksi tidak jelas parameternya dan berpotensi memihak pihak yang punya afiliasi politik. “Pengusaha yang jujur justru enggan masuk karena risiko reputasi, yang antre masuk ya mereka yang punya afiliasi politik” kata Media.

Kolaborasi para pelaku usaha

Di sisi lain, masih banyaknya hambatan ini ternyata tak menyurutkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun 1.000 SPPG. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan, upaya pihak BGN dalam

membangun 30.000 titik dapur SPPG merupakan langkah besar yang perlu mendapat dukungan luas. “Ini bukan hal yang kecil dan kelihatannya bisa on target,” kata Anindya.



Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan komitmen dunia usaha dalam merealisasikan salah satu program quick wins yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin Indonesia. Foto: Dok. Kadin.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengerahkan kekuatan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan dapur bergizi, termasuk melibatkan UMKM dalam aspek pendanaan. Anindya mengatakan pihaknya semangat dan ingin berkontribusi pada program pemerintah ini. Menurutnya, ini merupakan satu contoh kerjasama kemitraan pemerintah dengan pengusaha yang nyata.

Ia memperkirakan bila target 1.000 SPPG ini bisa direalisasikan maka lebih dari 50.000 orang bisa bekerja, sehingga turut menggerakkan ekonominya juga menjamin bahan baku untuk MBG akan dipasok sepenuhnya dari daerah. “Kebijakan ini memberdayakan pengusaha dan masyarakat lokal. Jadi bukan hanya soal gizi, tapi juga perputaran ekonomi rakyat yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.